



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rachamdi Nomor 1 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 32166 Fax. (0322) 321165 E-Mail : [perencanaankeuanganlmq@gmail.com](mailto:perencanaankeuanganlmq@gmail.com)  
Website : [bagbka@lamongankab.go.id](mailto:bagbka@lamongankab.go.id)

---

Lamongan, Agustus 2025

Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

Di  
Lamongan

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 000.8.6.3/ /413.034/2025

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Tindaklanjut Hasil Evaluasi Manajemen Resiko Tahun 2025	1 (satu) lembar	Bagian Perencanaan dan Keuangan Kab. Lamongan

Diterima tanggal Agustus 2025

Penerima  
.....  
.....

Pengirim  
a.n Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Perencanaan dan  
Keuangan



Nomor telepon .....

Dr. Drs. POEDJIJANTO, MM.  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 196809241989111001



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rachamdi Nomor 1 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 32166 Fax. (0322) 321165 E-Mail : [perencanaankeuanganlmq@gmail.com](mailto:perencanaankeuanganlmq@gmail.com)  
Website : [bagbka@lamongankab.go.id](mailto:bagbka@lamongankab.go.id)

### TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

NO	SASARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perlu dilakukan perbaikan dengan menetapkan Pemilik Resiko yang sesuai pada Reviu Penetapan Konteks	Telah dilaksanakan review dan revisi terhadap penetapan Pemilik Resiko, Dimana Pemilik Resiko Strategis Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2.	a. Mengidentifikasi Resiko dengan membuat (Mengisi Kertas Kerja) atas perumusan/penilaian resiko bidang/unit kerja b. Membuat pernyataan risiko yang tepat (bukan negasi dari indikator kinerja) c. Menetapkan risiko kemitraan dan risiko fraud	a. Telah dilaksanakan identifikasi risiko dengan membuat kertas kerja atas perumusan / penilaian resiko bidang /unit kerja di aplikasi SIMARIO akan tetapi pada saat dilihat di Review SIMARIO, kertas kerja yang telah diinput tidak muncul, tetapi kami lampirkan bukti inputan kami di aplikasi SIMARIO. b. Telah dibuat pernyataan risiko yang sesuai dengan ketentuan dan bukan kalimat negasi atau indikator kinerja. c. Telah dilaksanakan identifikasi, penilaian risiko fraud dan risiko kemitraan yang dimasukkan dalam daftar risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana identifikasi terlampir
3.	Mengidentifikasi Reviu Analisis Risiko terkait penetapan skala kemungkinan dan dampak dengan menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi), agar dapat menentukan	Bagian Perencanaan memiliki responden lebih dari 50% dari total jumlah pegawai yang ada, total pegawai di Bagian kami sebanyak 7 orang, Dimana responden kami berjumlah 7 orang, jadi total responden yang kami gunakan 100% dari jumlah pegawai kami.
4.	Mengidentifikasi Reviu Evaluasi Risiko terhadap skla risiko prioritas yang belum ditetapkan dikarenakan responden masih 0 (nol) serta melakukan FGD untuk	Bagian Perencanaan telah memilih responden dan membagikan kuisioner kepada pegawai sebanyak 7 orang dari total jumlah pegawai sebanyak 10

	menetapkan risiko mana yang akan dilakukan RTP	orang berarti sudah lebih dari 50% dari total jumlah pegawai, dan sudah ditentukan melalui FGD mana skala prioritas yang akan dilakukan RTP
--	--	---

a.n Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan  
Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Perecanaan dan  
Keuangan



Dr. Drs. POEDJIJANTO, MM.  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 196809241989111001

## 1. Bukti Tindaklanjut Pemilik Resiko Strategis

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena		
1	Nilai IKM	Nilai IKM Sekretariat Daerah turun	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
2	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP turun	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	

## 2 Reviu Identifikasi Resiko

### a. Pengisian Kertas Kerja

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama OPD	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah									
Tahun Penilaian	2025									
Periode yang Dinilai	2025									
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa									
Urusan Pemerintahan	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif									
OPD yang dinilai	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah									
Tujuan Strategis Pemerintah	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa									
Sasaran	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Desa									
No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak			Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Nilai IKM	Nilai IKM Sekretariat Daerah turun	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP turun	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Buat Kertas Kerja Strategis Pemda Baru

### b. Pernyataan Risiko

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena		
1	Nilai IKM	Jika kualitas pelayanan menurun, maka berpotensi menyebabkan turunnya nilai IKM yang berdampak pada menurunnya kepercayaan atau citra instansi	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
2	Predikat SAKIP	Risiko penurunan predikat SAKIP dapat terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada menurunnya akuntabilitas kinerja instansi.	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	

### c. Penambahan Risiko Kemitraan dan Risiko Fraud

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena		
1	Nilai IKM	Jika kualitas pelayanan menurun, maka berpotensi menyebabkan turunnya nilai IKM yang berdampak pada menurunnya kepercayaan atau citra instansi	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
2	Predikat SAKIP	Risiko penurunan predikat SAKIP dapat terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada menurunnya akuntabilitas kinerja instansi.	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
3	Perencanaan Sekretariat Daerah	Risiko Komunikasi Tidak Efektif (Risiko Kemitraan)	RSO 23.33.10.73	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Koordinasi antar pihak lemah, saluran komunikasi tidak jelas	Eksternal dan Internal	C	1. Perencanaan tidak sinkron 2. Duplikasi kegiatan 3. Inefisiensi anggaran.	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Manipulasi data perencanaan berisiko menghasilkan dokumen yang tidak akurat sehingga program menjadi tidak tepat sasaran dan menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Risiko Fraud)	RSO 23.33.10.74	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan data/informasi tidak akurat atau ada kepentingan tertentu.	Eksternal dan Internal	C	Dokumen perencanaan tidak sesuai kondisi riil, program tidak tepat sasaran, berpotensi merugikan daerah	12 Bagian Lingkup Setda	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	

### 3. Reviu Analisis Risiko

Total jumlah pegawai Bagian Perencanaan dan Keuangan Adalah 11 Orang, total responden yang kami pilih ada 7 Orang, jadi sudah melebihi total 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi).

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)										Lampiran 5 Form 1.a
NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEEN (R)								SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	c	
<b>A. PENEGRAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	3	4	3	3		Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	4	3	4	3	4		Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	4	4	3	4		Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	3	4	4	4	3	4		Memadai
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	4	4	4	4	4		Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	3	3	4	4	4		Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	3	3	3	4	4	4		Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	4	4	4	4	4		Memadai
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	4	3	3		Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	4	4	3		Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	4	3	3		Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	4	3	3		Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	4	4	3		Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	4	3		Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	4	3	3		Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	3	3	3	4	4	3	3		Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
<b>E. PENDELEGASIAN WEWEWANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Kriteria pendeklegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
2	Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
3	Kewenangan direview secara periodik	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
<b>F. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	4	4	3		Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	4	4	3		Memadai
3	Incentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	4	3	3		Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	4	4	4	3		Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
<b>G. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik	3	3	3	3	4	3	3		Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	4	3	3		Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPPIP	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	4	4	4	4	4		Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
<b>H. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>										<b>MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	4	3	3		Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	4	3	3		Memadai

#### 4. Reviu Evaluasi Risiko

Jumlah responden Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah 7 Orang, total jumlah pegawai Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah 11 Orang

Kertas Kerja Analisa Risiko Risiko Strategis Pemda										
Risiko			Nilai IKM		Predikat SAKIP		Perencanaan Sekretariat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan	
No	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 25.33.10.71		RSO 23.33.10.72		RSO 23.33.10.73		RSO 23.33.10.74	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
1	Adytia meishar bagus	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	2	5	3	3	1	3	1
2	Siti Yahwaro	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	3	3	1	3	1
3	Dr.Drs.Poedjijanto, M.M	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	2	2	1	2	1
4	Ratna Marhaeni	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	1	3	1	1	1
5	Luthfi Prima Shofi	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	3	3	1	3	1
6	Delinda	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	2	3	1	4	1
7	Eka Dianita	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	3	3	1	3	1
Rata-rata			5	2	5	3	3	1	3	1

#### Skala Prioritas Risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jika kualitas pelayanan menurun, maka berpotensi menyebabkan turunnya nilai IKM yang berdampak pada menurunnya kepercayaan atau citra instansi	RSO 25.33.10.71	6	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	kepercayaan masyarakat turun
2	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Risiko penurunan predikat SAKIP dapat terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan laporan tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada menurunnya akuntabilitas kinerja instansi.	RSO 23.33.10.72	13	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Laporan kinerja yang tidak transparan	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal
3	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Risiko Komunikasi Tidak Efektif (Risiko Kemitraan)	RSO 23.33.10.73	3	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Koordinasi antar pihak lemah, saluran komunikasi tidak jelas	1. Perencanaan tidak sinkron 2. Duplikasi kegiatan 3. Inefisiensi anggaran.
4	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Manipulasi data perencanaan berisiko menghasilkan dokumen yang tidak akurat sehingga program menjadi tidak tepat sasaran dan menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Risiko Fraud)	RSO 23.33.10.74	3	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan data/informasi tidak akurat atau ada kepentingan tertentu.	Dokumen perencanaan tidak sesuai kondisi riil, program tidak tepat sasaran, berpotensi merugikan daerah